

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PEMBINAAN
INDUSTRI SAGU DI KECAMATAN TEBING TINGGI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



DISUSUN OLEH :

**PHIRMA APRI SASTIPA
NPM : 167310254**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU TAHUN**

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Phirma Apri Sastipa
NPM : 167310254
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan
Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.

Pekanbaru, 02 Maret 2021

Turut Menyetujui :
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Phirma Apri Sastipa
NPM : 167310254
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan
Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimannya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 01 Juli 2021

Ketua,



Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.

Sekretaris,




Septa Juliana, S.Sos., M.IP.

Anggota,



Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.

Mengetahui
Wakil Dekan I



Indra Syafri, S.Sos., M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Phirma Apri Sastipa
NPM : 167310254
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan
Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 26 Agustus 2021
An. Tim Penguji

Ketua



Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.

Sekretaris



Septa Juliana, S.Sos., M.I.P.

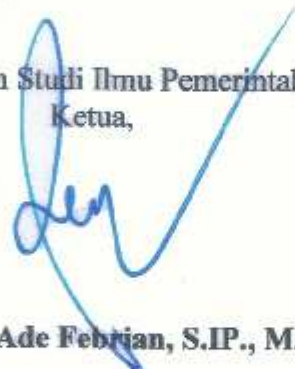
Turut Menyetujui

Wakil Dekan I



Indra Syafri, S.Sos., M.Si.

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan, yang berjudul “Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat pengurusan skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Bapak Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 25 Agustus 2021
Ttd,

Phirma Apri Sastipa



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFERENSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRAC.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
a. Tujuan Penelitian	13
b. Kegunaan Penelitian	13
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan	14
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	14
2. Konsep Peranan	18
3. Konsep Pembinaan.....	21
B. Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Pikiran	25
D. Konsep Operasional	26
E. Operasional Variabel.....	28
F. Teknik Pengukuran	29

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Populasi dan Sampel	33
D. Teknik Penarikan Sampel	33
E. Jenis dan Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	35
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	36

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Kepulauan Meranti	37
B. Gambaran Umum Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti	38

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	41
1. Identitas Responden.....	41
B. Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi.....	43
1. Indikator Memberi Pengarahan	46
2. Memberi Bimbingan.....	50
3. Melakukan Pengawasan	54
4. Memberikan Pendidikan Dan Pelatihan	58
5. Memberi Buku Petunjuk.....	61
C. Hambatan Peran Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten Kepulauan Meranti	70

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR KEPUSTAKAAN	77
---------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN	79
------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
I.1 Usaha Idustri Kecil dan Menegah Pagan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019	8
I.2 Usaha Idustri Kecil dan Menegah Pagan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019	9
I.3 Daftar Absensi pembinaan Kelompok Usaha Industri Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020	12
II.1 Penelitian Terdahulu	28
II.2 Operasional Variabel penelitian Tentang Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi	28
III.1 Populasi Dan Sampel Penelitian	33
III.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi	36
V.1 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin	42
V.2 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Umur.....	42
V.3 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	43
V.4 Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberi pengarahan Dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi.	46
V.5 Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberi bimbingan Dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi	49
V.6 Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberi pengawasan Dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan	

Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi	55
V.7 Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberikan pendidikan dan pelatihan Dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi.	56
V.8 Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberi Memberi buku petunjuk Dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi	62
V.9 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi..	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II.1 Kerangka Pemikiran Tentang Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi.....	24



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden Tentang Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi.....	79
2. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi.....	81

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Usulan Penelitian Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Phirma Apri Sastipa
NPM : 167310254
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta saksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Agustus 2021
Pelaku Pernyataan,

Phirma Apri Sastipa

**PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PEMBINAAN
INDUSTRI SAGU DI KECAMATAN TEBING TINGGI**

ABSTRAK

**OLEH :
PHIRMA APRI SASTIPA**

Pengembangan industri Industri Sagu dengan melakukan pembinaan pengelolaan terhadap kepemilikan Industri Sagu dengan tujuan meningkatkan kemampuan masyarakat didalam pengelolaan Industri Sagu tersebut. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi, Memberi pengarahan, Memberi bimbingan, Melakukan pengawasan, Memberikan pendidikan dan pelatihan dan Memberi buku petunjuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pembinaan Industri Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi serta mengetahui hambatan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian bahwa Pembinaan Industri Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi melalui lima indikator berada pada kata gori “cukup baik” dimana diketahui kegiatan pembinaan sudah dilakukan namun belum merata terhadap pemilik usaha sagu. Kesimpulan Pembinaan Industri Sagu sudah dilaksanakan namun belum maksimal mulai dari ketetapan waktu kegiatan pembinaan, kemampuan petugas, dan evaluasi peningkatan upaya pembinaan. Kesimpulan penelitian bahwa Peranan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pembinaan Industri Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi belum terlaksana dengan maksimal. Namun penulis menyarankan agar Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti meningkatkan waktu kegiatan pembinaan, jumlah petugas dalam memberikan pembinaan, dan melakukan evaluasi dalam meningkatkan kegiatan pembinaan usaha sagu.

Kata Kunci : Peranan, Pembinaan, Usaha Isdustri.

THE ROLE OF THE INDUSTRY AND MANPOWER OF MERANTI ISLANDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SAGO INDUSTRY IN TEBING TINGGI DISTRICT

ABSTRACT

BY :
PHIRMA APRI SASTIPA

Development of the Sago Industry by providing guidance on the management of the Sago Industry ownership with the aim of increasing the community's ability to manage the Sago Industry. The Department of Industry and Manpower of the Meranti Islands Regency which includes, providing direction, providing guidance, conducting coaching, providing education and training and providing guidebooks. The purpose of this study was to determine the role of the Department of Industry and Manpower in the Meranti Islands Regency in the Development of the Sago Industry in Tebing Tinggi District and to find out the obstacles in carrying out the tasks of the Meranti Islands Regency. Department of Industry and Manpower in the Development of the Sago Industry in Tebing Tinggi Regency. The research method used is a quantitative method. The results showed that the development of the Sago Industry in Tebing Tinggi Regency through five indicators was in the "good enough" category where it was known that development activities had been carried out but not evenly distributed to sago business owners. Conclusion The development of the sago industry has been carried out but has not been maximized starting from determining the timing of coaching activities, the ability of officers, and evaluating the improvement of coaching efforts. The conclusion of this research is that the role of the Department of Industry and Manpower in the Meranti Islands Regency in the Development of the Sago Industry in Tebing Tinggi Regency has not been carried out optimally. However, the authors suggest that the Department of Industry and Manpower of the Meranti Islands Regency increase the time for coaching activities, the number of officers in providing guidance, and carry out evaluations in improving sago business development activities.

Keywords: Role, Development, Industrial Business.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara tersebut maka Pemerintah telah menyusun pemerintahan dalam tiga tingkatan yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Untuk mencapai keefektifan penyelenggaraan pemerintah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan kedudukan Pemerintah Daerah dan Desa dalam pasal 18B yaitu, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara Republik Indonesia untuk mempermudahnya maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Sebagai mana yang terdapat dalam undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan

urusan pemerintahan umum dimana urusan Konkuren sebagai urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dimana pada pasal 12 Point (3) disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa urusan pilihan perindustrian sebagai kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah. Pengembangan Industri dalam Usaha kecil dan menengah ditangani oleh daerah dalam mengembangkan industri yang berbasiskan pengembangan ekonomi rakyat melalui keikut sertaan pemerintah dalam memberikan mutu pengetahuan dan hasil usaha industri yang berdaya saing di pasaran.

Undang-undang No 5 tahun 1984 tentang Perindustrian pasal 15 ayat 2 dikatakan Pemerintah mengadakan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan, mengenai pelaksanaan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksi industri termasuk pengangkutannya.

Pentingnya peranan industri kecil dalam mengembangkan perekonomian nasional ditunjukkan dengan ditetapkannya Peraturan dalam negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian izin Usaha Mikro dan Kecil. Dalam Permendagri ini diatur bahwa pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil perlu

diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya, dan pemberian izin usaha sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Untuk itu dalam meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia, maka pemerintah harus lebih bijak mengenakan program yang direncanakan untuk diberikan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengembangkan ilmu dan sumber daya yang mereka miliki untuk diterapkan dalam kehidupan melalui Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewajiban untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah termasuk dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kabupaten Meranti Provinsi Riau, merupakan salah satu penghasil sagu dengan kualitas baik di Indonesia. Salah satu daerah perkebunan dan pengolahan sagu berada di Kecamatan Tebing Tinggi. Desa Banglas merupakan desa paling luas wilayahnya 35.56 km² (43,90%) diantara 9 desa/kelurahan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau. Komoditas sagu tersebut bahkan dipasarkan baik lokal maupun ekspor, yaitu antara lain ke Malaysia.

Tanaman sagu termasuk jenis tanaman liar yang tumbuh di air payau atau rawa yang terdapat di selat-selat di sekitar Kabupaten Meranti. Sedangkan tempat pengolahannya atau pabrik disebut Kilang berada di pesisir pantai. Sagu termasuk salah satu bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan berpotensi untuk menggantikan makanan pokok beras yang tingkat konsumsinya terus meningkat sementara lahan persawahannya semakin berkurang. Selama ini sagu banyak digunakan untuk bahan baku berbagai produk makanan, antara lain mie, cendol, kerupuk, empek-empek dan sebagainya.

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah industri Sagu dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM IKM baik pengetahuan keterampilan/kreatifitas ataupun Administrasi sehingga mereka mampu dan berdaya saing serta menetapkan keputusan sendiri terkait dengan Usaha Industri yang dilaksanakannya. Pengembangan Industri usahan pangan melalui tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti terlihat pada pasal 3 bahwa Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerjaterdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. Bidang Pengembangan Potensi Industri terdiri dari:
 - a. Seksi Pendataan Potensi dan Pelaporan Industri;
 - b. Seksi Perizinan dan Pengawasan Industri.
4. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan IKM Aneka Industri;
- b. Seksi Pembinaan IKM Sandang dan Pangan.
- 4. Bidang Pengembangan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Informasi, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 6. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial;
 - b. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial;
 - c. Seksi Pengawasan Perlindungan dan Perizinan Tenaga Kerja.

Berdasarkan penjelasan diatas pelaksanaan pembinaan industri usaha pangan melalui Seksi Pembinaan dan Pengembangan IKM Sandang dan Pangan dimana pada pada Pasal 15 dikatakan bahwa tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan IKM Sandang dan Pangan sebagai berikut :

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan IKM Sandang dan Pangan mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri kecil dan industri menengah sandang dan pangan;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menghimpun dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran industri kecil dan industri menengah Sandang dan Pangan.
 - c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah sandang dan pangan;
 - d. Merencanakan peningkatan industri Kecil dan makanan khas daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - e. Memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap pelaku usaha industri untuk meningkatkan dan pengembangan industri;
 - f. Menyusun rencana dan bahan pembinaan industri sandang dan pangan;
 - g. Menyusun strategi perencanaan pemasaran dan promosi produk IKM;
 - h. Mempersiapkan dan merencanakan industri agar bisa mengakses bantuan modal baik melalui PEMDA, BANK, BUMN, BUMD maupun Perusahaan swasta;
 - i. Menginventarisasi potensi dan permasalahan yang ada dibidang industri kecil dan menengah sebagai dasar untuk pengembangan IKM;
 - j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang pembinaan dan pengembangan Industri kecil menengah.

Pelaksanaan pengembangan industri pangan masih terlihat banyak mengalami hambatan dikarenakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah menjadi hambatan mendasar dalam pengembangan usaha kecil tersebut, ditandai dengan kurangnya kemampuan pengusaha industri pangan menguasai pasar, dan kurangnya pengetahuan para pengusaha tentang bagaimana menjalankan usaha yang baik.

Pembinaan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti tidak terlepas dari program kegiatan yang secara langsung dilaksanakan dengan tujuan tercapainya kinerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pencapaian pembinaan bagi setiap Industri pangan yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun program kinerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap Industri Pangan di Kecamatan Tebing Tinggi tahun 2019 sebagai berikut:

1. Melakukan Pendataan setiap Industri Usaha Pangan.
2. Penetapan Pembinaan dan Pelatihan bagi setiap Industri Usaha Pangan.
3. Waktu Pembinaan dan Pelatihan selama 5 (lima) Hari.
4. Pemasaran dan Promosi Produk Industri Usaha Pangan.

Penjelasan diatas terlihat jelas program yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti mulai dari pendataan, pembinaan dan pelatihan sampai dengan promosi hasil produk Industri Usaha Pangan.

Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan berbagai upaya dalam membina pelaku Industri Kecil Menengah dengan tujuan tercapainya sasaran peningkatan pengembangan Industri Kecil Menengah yang ada, adapun tahapan pembinaan yang diberikan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengembangan Industri Kecil Menengah sebagai berikut :

a. Pra Perencanaan

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan persiapan pra perencanaan terkait penetapan jadwal pelatihan, dan pendekatan dan penentuan rancang bangun pelatihan serta survey pendahuluan yang dilakukan panitia pelaksana atau Bidang Pembinaan IKM, ke beberapa kelompok usaha industri.

b. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan terkait dengan beberapa kegiatan yaitu: penetapan waktu dan tempat kegiatan, jumlah peserta, susunan panitia pelatihan, pembuatan undangan, materi, metode penyampaian materi, jumlah materi dalam satuan mata pelatihan, kebutuhan alat dan bahan serta penentuan jumlah anggaran yang dibutuhkan.

c. Pelaksanaan

Narasumber hadir di lokasi pada pukul 08.30, setelah sebelumnya bersilaturahmi dengan peserta dan panitia pelaksana, langsung menyampaikan materi dan praktek sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam proses perencanaan.

d. Evaluasi

Evaluasi Terhadap Keseluruhan Kegiatan Evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam dua tahap. Pertama dilakukan langsung setelah acara selesai dan yang kedua dilakukan monitoring terhadap peserta yang sudah mengikuti pelatihan.

Pelaksanaan Tahapan pembinaan masih dirasakan belum sesuai dengan dengan pelaksanaan dilapangan dimana dari waktu tahap pelaksanaan pembinaan selama 5 (lima) hari melainkan dilapangan sewaktu kegiatan hanya berlangsung 3 (tiga) hari serta belum adanya promosi hasil industri usaha pangan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga terkesan bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan tidak seutuhnya dilaksanakan sesuai dengan tahapan pembinaan yang ada sehingga pembinaan yang diberikan tidak memberikan dampak terhadap kemajuan secara utuh terhadap Industri Pembinaan pangan Sagu.

Kegiatan pembinaan dan pelatihan terhadap pemilik usaha sagu sangat memberikan perbaikan guna pengelolaan hasil industry sagu dan bertujuan pengembangan hasil olahan sagu lebih baik dan dapat memberikan daya Tarik konsumen. Adapun berikut pembinaan dan pelatihan yang telah di lakukan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

Tabel I.1 Pembinaan dan Pelatihan Pengelolaan Sagu 2016-2019.

No	Tahun	Pembinaan dan pelatihan
1	2016	Pelatihan pengolahan sagu di UPT Pelatihan Pengembangan Industri dan Perdagangan Jl. Hangtuh Ujung Pekanbaru
2	2017	Magang Pengolahan Sagu di Cirebon di Cirebon oleh Edi Jl Gogok Kecamatan Tebing Tinggi Barat
3	2018	-
4	2019	Mengikuti Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kompetensi IKM Pengolahan Sagu

Sumber : Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, 2020

Berdasarkan tabel diatas Pembinaan dan Pelatihan Pengelolaan Sagu 2016-2019, dimana diketahui pada tahun 2019 tidak diadakan kegiatan pembinaan dan pelatihan. Tentunya hal ini kegiatan pembinaan dan pelatihan harus ditingkatkan di setiap tahunnya guna meningkatkan pengembangan pengelolaan sagu.

Adapun berikut Industri Usaha Pangan Sagu yang diberikan pembinaan oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

Tabel I.2 Usaha Idustri Kecil dan Menegah Pagan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019

No	Usaha Industri	Jumlah Usaha	Pembinaan	Persentase	Jumlah Pegawai	Pembinaan	
						Waktu	Realisasi
1	Sagu	30 Usaha	17	56.7%	4	5 Hari	3 Hari

Sumber : Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, 2020

Berdasarkan tabel diatas Usaha Idustri Kecil dan Menegah Pangan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 dengan

usaha industri pangan Sagu dengan jumlah kepemilikan usaha sebanyak 30 Usaha dengan mengikuti pembinaan sebanyak 17 pemilik usaha industry Sagu dengan jumlah pegawai yang memberikan pembinaan sebanyak 4 (empat) pegawai dengan waktu pembinaan selama 3 (tiga) hari. Hal ini terlihat bahwa pembinaan yang diberikan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti belum terlaksana dari jumlah usaha pangan yang ada serta ketetapan waktu lamanya kegiatan pembinaan. Hal ini sudah seharusnya Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan perataan pembinaan terhadap setiap kepemilikan usaha Sagu guna meningkatkan pengetahuan pengelolaan usaha pangan serta meningkatkan pendapatan.

Adapun berikut Daftar kehadiran kegiatan pembinaan Kelompok Usaha Industri Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.3 Daftar Absensi pembinaan Kelompok Usaha Industri Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

No	Nama	Alamat	Kehadiran	
			Hadir	Tidak Hadir
1	Sagu	Jl. Bakti	✓	
2	Arbainah	Jl. A. Yani		
3	Rosmeily	Jl. Budaya	✓	
4	Titik Sumiati	L. Budaya Gg Nurul Iman		✓
5	Yeni Marlina	JL. Banglas Gg. Dulia	✓	
6	Warti	L.Perusahaan Kondur		✓
7	Supardi	Jl. Utama	✓	
8	Jhon Heri	Jl. Pusara		✓
9	Hayati	L. Pusara	✓	
10	Faridah	Jl. Pusara	✓	
11	Rubiah	L. Pusara	✓	
12	Didik Setiawan	L. Pusara	✓	
13	Asiah	Jl. Banglas		✓
14	Kamaruddin	Jl. Banglas	✓	
15	A. Muhaimin	JL. Kasmin		✓

1	2	3	4	5
16	Sariyatun	Jl. Banglas Gg. Antara		✓
17	Zaleha	JL. Perumbi Gg.Cempedak	✓	
18	Jamilah	Jl. Kubur Baru	✓	
19	Lastri	Jl. Kelapa		✓
20	Sukarmi	JL. Rintis Gg.Pinang	✓	
21	Semi	JL. Rintis Gg.Rambutan		✓
22	Giarti	JL.Kencana		✓
23	Suniah	JL. Rintis Gg.Karet	✓	
24	Jumi	Jl. Kencana		✓
25	Jumino	Jl. Rintis Gg.Karet		
26	Anis	Jl. Empaka	✓	
27	Sumarni	Jl.Sempurna	✓	
28	Mulchalis	Jl.Banglas		✓
29	Anuar	Gg. Antara	✓	
30	Ida	Gang Pusara	✓	

Sumber : Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan, 2021

Berdasarkan tabel diatas Daftar Absensi pembinaan Kelompok Usaha Industri Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020. Dimana diketahui dari 30 pemilik usaha Sagu yang hadir hanya 17 orang dan dilakukan pembinaan hal ini dikarenakan belum dilakukan pengundangan secara menyeluruh kepemilik usaha industry sagu diKecamatan Tebing Tinggi sehingga tidak secara menyeluruh menerima kegiatan pembinaan.

Mewujudkan pelaksanaan program pemerintah tentang industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, harus memperhatikan keluhan dan masalah yang di sampaikan oleh masyarakat, yaitu minimnya perhatian dari Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti yang mana belum berjalannya perkembangan pengetahuan pengelolaan industri Sagu karena belum optimalnya perhatian dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan pelatihan yang diberikan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan penjelasan diatas adapun yang menjadi fenomena dalam Pelaksanaan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

1. Terindikasih bahwa pelaksanaan pembinaan ditetapkan selama 5 hari melainkan dilapangan terlaksana selam 3 hari pembinaan yang diberikan mulai dari pemberian materi pembinaan sampai dengan praktek kegiatan pelatihan.
2. Terindikasih bahwa dari kepemilikan usaha sagu sebanyak 30 usaha melainkan yang diberikan pembinaan sebanyak 17 usaha sehingga hal ini menyebabkan banyaknya usaha yang masih ketinggalan dalam hal pengetahuan pengembangan usaha tersebut.

Dari berbagai uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas kemudian penulis dapat merumuskan masalah yang perlu untuk dikajikan pembahasan penelitian. Adapun masalah yang dirumuskan dalam penelitian Skripsi ini adalah **“Bagaimanakah Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi.
- b) Untuk mengetahui hambatan Pelaksanaan Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pihak-pihak terkait dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi.
- b) Akademis: Untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang telah diperoleh terutama dalam Pelaksanaan Pembinaan Industri Pangan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c) Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi referensi kepustakaan Ilmu Pemerintahan dan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan;

Menurut Musanef dalam Syafiie (2013;32) ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur – unsur dinas. Berhubungan dengan keserasioan ke dalam dan hubungan antara dinas–dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis masalah – masalah sentralisasi. Desentralisasi koordinasi pengawasan ke dalam dan keluar.
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara Pemerintah dan yang diperintah. Dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari ditimbulnya pertentangan–pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam Pemerintahan.
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas - luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi.

Menurut Mahfud (2001:66) Pemerintah dalam arti luas didefenisikan sebagai seluruh organ kekuasaan di dalam Negara, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas Pemerintah ditarik sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang dalam mencapai tujuan Negara. Tetapi dalam arti yang sempit Pemerintah hanya mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas Pemerintah (eksekutif) yang dilakukan oleh kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.

Sedangkan menurut Monsteque dalam Setyawan S (2004:33) Pemerintahan adalah seluruh lembaga yang bisa dikenal dengan *namatrias politica* yaitu legislatif (membuat undang-undang).

Pemerintah secara umum (dalam Maulidiah 2014;1-2) adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah, dan dilengkapi oleh alat – alat kelengkapan Negara yang berperan membantu Pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas – tugas Pemerintah. Sehingga unsur utama Pemerintah tersebut adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas – tugas Pemerintahan yang dalam ini adalah penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga Pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan.

Pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki yang merupakan penjabaran dari tugas pokok Pemerintah, ketiga fungsi hakiki Pemerintah tersebut yakni, memberikan pelayanan kepada masyarakat (*service*), memperdayakan segala potensi yang dimiliki (*empowerment*) serta melaksanakan pembangunan (*development*) menurut Maulidiah (2014;4).

Menurut Ndraha (2003;6) Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan Civil bagi memproses setiap orang melalui hubungan Pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan

(harapan) yang diperintah. Dalam segala hubungan ini, bahkan Negara asing atau siapa saja yang ada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia makaberhak menerima layanan civil tertentu, dan Pemerintah wajib melayani

Lahirnya Pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatkan kebutuhan, peran Pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama menurut Rasyid (2005;13)

Kemudian W.S. Sayre dalam Zaidan (2013; 18) juga mengemukakan bahwa Pemerintahan merupakan satu lembaga negara yang terorganisasi dan menjalankan kekuasaannya. Robinson dalam Labolo (2013; 22) menyatakan bahwa “pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum”. Dari beberapa pengertian dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga Negara dalam memenuhi dan melindungi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan Negara.

Menurut Ndraha (2003;5) mengatakan bahwa Pemerintahan adalah suatu sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu yang diperintah akan jasa public dan pelayanan sipil, sedangkan Pemerintah

adalah organ berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan Pemerintah.

Menurut syafiie (2006;3) secara etimologi Pemerintahan berasal dari kata perintah yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :

- a. Mendapat awalan “pe” menjadi kata “perintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan yang mengurus suatu Negara.
- b. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “Pemerintahan” berarti perihal atau cara perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Menurut Syafiie (2013;12) Pemerintahan adalah kelompok orang – orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh Pemerintahan itu sendiri.

Menurut Munaf (2015;47) Pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu Pemerintahan/Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Yusri Munaf 2015;47) Bentuk-bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format Pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan Pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk Pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah Pemerintah yang bersifat monarkis (*monarchy*), Pemerintahan yang bersifat diktatoris (*dictatorship*), Pemerintahan yang bersifat teokratis, dan Pemerintahan yang bersifat pluraristik (*plural headship*).

2. Bentuk Pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah system Pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system Pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, system Pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk Pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah limited monarcy kemudian berkembang menjadi Pemerintahan republik.

Bentuk Pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi Pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (dalam Munaf, 2015;48) mengatakan bahwa bentuk Pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu Negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi politik.

Berdarkan penjelasan diatas Pemerintahan adalah suatu sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu yang diperintah akan jasa public dan pelayanan sipil, sedangkan Pemerintah adalah organ berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan Pemerintah.

2. Konsep Peranan

Menurut Soekanto (2012:212-213) memberikan pengertian tentang peranan, adalah : Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan

adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Seperti orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Juditira (2004:25-26), bahwa :Teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah "peranan" diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu walaupun tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan aktor atau orang tersebut. Setiap individu memiliki sekumpulan peranan atau aneka ragam peranan (*multiple role*) yang dibedakan dengan satuan peranan (*role set*). Satuan peranan itu tidak terpisah dari satuan peranan lainnya tetapi berkaitan dan saling melengkapi.

Menurut Rivai (2004:148) peran merupakan perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Lebih lanjut Rivai mengaitkan peran sebagai tolak ukur kinerja seseorang. Peran dapat

dijadikan tolak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orang itu dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya atautkah tidak.

Menurut Soekanto (2006:243) peranan atau (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Menurut Lailia (2009 ;77) peranan adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa member anjuran, member penilaian, member sanksi dan lain-lain. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peranan yang tergabung dan terkait pada satu status ini dinamakan perangkat peran. Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat atau yang disebut sebagai struktur social, ditentukan oleh hakekat dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka diantara orang-orang yang memainkannya.

Menurut Hasan (2000;89), telah mengembangkan Teori Peranan. Teori peranan menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peranan merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peranan yang harus dilakukan itu, adalah :

- a. Kejelasan perilaku dan pengetahuan yang sesuai dengan peran
- b. Konsistensi respon orang yang berarti terhadap peran yang dilakukan
- c. Kesesuaian dan keseimbangan antara peran yang diemban
- d. Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran
- e. Pemisahan perilaku yang akan menciptakan ketidaksesuaian perilaku peran.

Hermansyah (2011:75) menguraikan peran ke dalam tiga cakupan. Pertama, meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua, peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peran juga dapat dipandang sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan teori di atas dikatakan bahwa peran merujuk ke serangkaian pola perilaku yang diharapkan yang menempel pada seseorang yang menduduki posisi tertentu pada unit sosial tertentu”.

3. Konsep Pembinaan

Secara substantif, menurut Rasyid (2005:48), tugas pokok Pemerintahan dibagi dalam 3 fungsi pokok, yakni :

- 1 Pelayanan (service)
- 2 Pemberdayaan (empowerment)
- 3 Pembangunan (development)

Pembinaan sebagai suatu konsep yang selalu dipakai untuk memacu pertumbuhan pembangunan dberbagai sektor selalu mendapat perhatiandari

Pemerintah.hal ini tentu disebabkan karena Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan sementara pembangunan akan berhasil apabila masyarakat tahu dan mengerti apa yang seharusnya ia lakukan sebagai bagia dari penggerak pembangunan.

Reshandy (2010:18) mengatakan Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan”atas sesuatu.

Karena itu peranan Pemerintah dalam hal ini lurah diharapkan melakukan berbaga pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dilingkungan kerjanya.

Sementara itu Ndraha (2003 : 166) mengatakan istilah pembinaan menunjukkan antara lain, pengarahan pengaturan, dan pengisian, bahwa “pembinaan lembaga masyaraakat berarti usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka penataan kembali agar pranata atau lembaga masyarakat, pengarahan tingkah laku maasyarakaat dan pengisian mental anggota masyarakat dengan budaya nasional.

Menurut Thoha (2008; 207) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan kemajuan, peningkatan dari pertumbuhan suatu organisasi dengan menggabungkan kata

tersebut organisasi dan pembinaan dapat disimpulkan bahwa pembinaan organisasi meliputi :

1. Tindakan
2. Proses
3. Hasil tindakan lebih lanjut,
4. Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi.

Sementara itu untuk melaksanakan suatu pembinaan maka Ndraha (2003 : 168) mengatakan melalui :

1. Pendidikan
2. Latihan (upreading, kursus, dan sebagainya)
3. Lokakarya (workshop)
4. Bimbingan lapangan (penyuluhan, laboratorium, dan sebagainya)
5. Penerangan
6. Pertemuan, diskusi, musyawarah
7. Pers, radio dan TV
8. Literature dan sebagainya
9. Intruksi-intruksi teladan
10. Intruksi-intruksi

Pembinaan Menurut Munandar (2010:52) adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pembinaan disiplin kerja pegawai adalah rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan sikap kesediaan pegawai mentaati Peraturan yang berlaku.

Menurut Basri (2010:57) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain adalah :

1. Penyuluhan
2. Pengarahan

3. Bimbingan

Jadi dengan demikian pembinaan yang diberikan ini dapat menjangkau seluruh orang yang dibina dan dari itu pembinaan ini tidak terlepas dari siapa yang membina serta apa yang dibina.

Selanjutnya menurut Thoha (2008:7) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjai lebih baik. Dalam hal pembinaan ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang dan perubahan atas sesuatu.

Sedangkan Munawir (2009:291) menyatakan bahwa pembinaan merupakan untuk tercapainya hasil kerja yang baik maka diperlukan beberapa ketentuan antara lain :

1. Adanya bimbingan dari atasan
2. Pemberian motivasi
3. Pengembangan karir
4. Memberi penghargaan

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjai lebih baik. Dalam hal pembinaan ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang dan perubahan atas sesuatu.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun Penelitian terdahulu didalam penelitian ini sebagai mana tabel berikut :

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Satya Hadi Hogantara, 2015 (Skripsi)	Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri lapet Bugi	1. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara. 2. Penggunaan teori	1. Metode Penelitian Kualitatif 2. Teori Penelitian 3. Lokasi penelitian. 4. Hasil penelitian.
2	Faisal Yunan Siregar, 2015 (Skripsi)	Pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis Dalam Pembinaan Industri Lempuk Durian	1. Teori yang digunakan. 2. Objek penelitian 3. Metode kuantitatif. 4. Metode pengumpulan data Observasi dan Dokumentasi	1. Lokasi penelitian. 2. Jumlah Informan 3. Hasil penelitian
3	Safri , 2016 (Skripsi)	Evaluasi tugas Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis Kampar Dalam Pembinaan Industri Lempuk Durian	1. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara 2. Objek penelitian.	1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif 2. Teori yang digunakan. 3. Lokasi penelitian. 4. Hasil penelitian

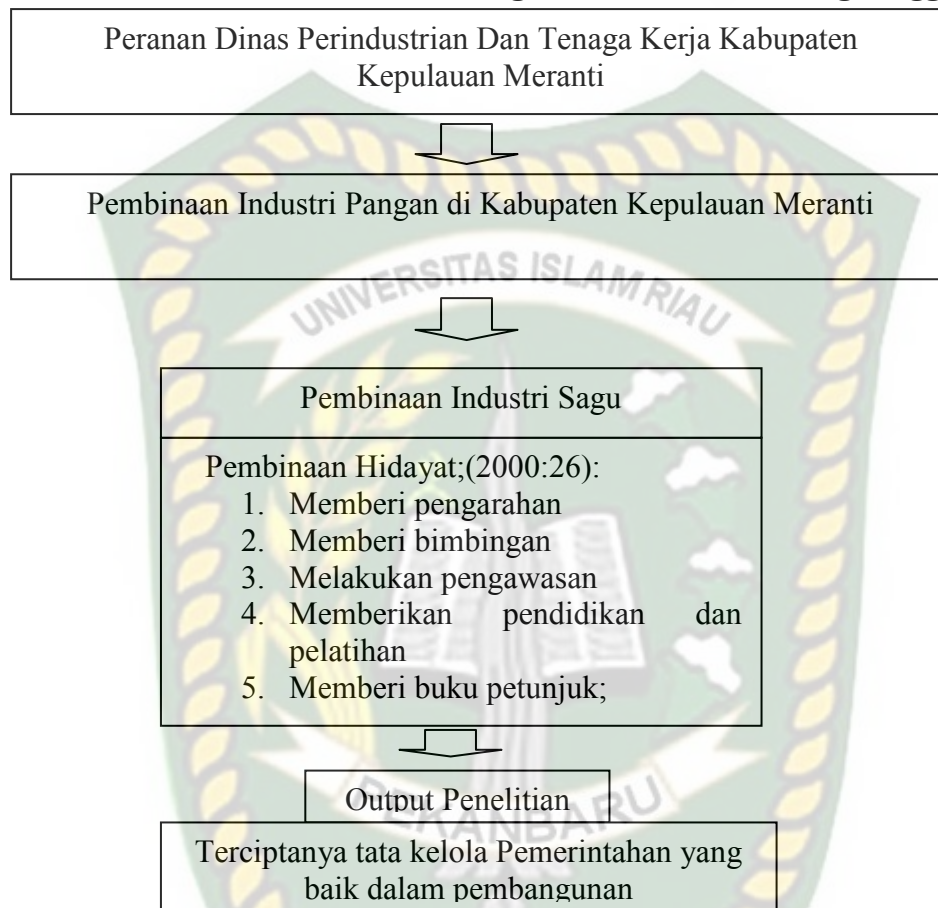
Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel diatas bahwa kebanyakan persamaa dengan penelitian adalah penggunaan Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara, penggunaan teori, begitu juga perbedaannya iyalah lokasi penelitian Metode penelitian yang digunakan dan hasil penelitian.

C. Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan gambaran alur fikir penelitian, maka dapat penulis tampilkan alur kerangka berfikir penelitian sebagai berikut :

Gambar II.I Kerangka Pemikiran Tentang Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi



Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaa penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca mudah memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya :

1. Peranan adalah peran Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan pembinaan Industri Kecil dan Menengah.

2. Tugas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti adalah penetapan upaya kinerja yang didasarkan ketetapan Dinas dalam kemampuan pegawai dalam mencapai tujuan.
3. Pembinaan Usaha Industri Pangan adalah pemberian pembinaan dan pelatihan terhadap Usaha Industri Kecil dan Menengah melalui pemberian materi, peraktek hingga evaluasi hasil pembinaan.
 - a. Memberi pengarahannya adalah Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengarahkan pembinaan dan pelatihan terhadap kepemilikan Usaha Industri Pangan
 - b. Memberi bimbingan adalah Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti mampu memberikan bimbingan yang meliputi bentuk-bentuk praktek kegiatan serta hasil kegiatan.
 - c. Melakukan pengawasan adalah pengawasan yang diberikan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti sejauh mana Dinas dalam melaksanakan pengawasan terkait usaha industri pangan yang telah diberikan pembinaan pelatihan.
 - d. Memberikan pendidikan dan pelatihan adalah sejauhmana Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan usaha kerajinan industri pangan agar kepemilikan usaha kerajinan industri memiliki pengetahuan dalam pengembangan usaha tersebut.
 - e. Memberi buku petunjuk adalah memberikan buku petunjuk terkait pengembangan pengelolaan Usaha Industri Pangan agar masyarakat lebih

paham bagaimana penanganannya lebih cepat dan maksimal serta dapat bersaing ditegah pasar ekonomi masyarakat.

- f. Memberi intruksi-intruksi adalah Penetapan tahapan-tahapan dalam pengembangan pengelolaan Usaha Industri Pangan akan hasil yang lebih baik.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2: Operasional Variabel penelitian Tentang Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Kategori
1	2	3	4	5
Pembinaan adalah usaha yang dilakukan secara sadar, teratur, dan terarah, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan subjek didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, bimbingan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang)	Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu	Memberi pengarahan	1. Penyampaian materi.	Baik
			2. Bentuk pelatihan.	Cukup Baik
			3. Hasil Industri.	Kurang Baik
	Di Kecamatan Tebing Tinggi	Memberi bimbingan	1. Bimbingan secara tertulis.	Baik
			2. Bimbingan secara peraktek.	Cukup Baik
				Kurang Baik
		Melakukan pengawasan	1. Pengawasan kegiatan.	Baik
			2. Pengawasan secara hasil.	Cukup Baik
		Memberikan pendidikan dan pelatihan	1. Pelatihan secara tertulis.	Baik
			2. Pelatihan dalam bentuk peraktek.	Cukup Baik
				Kurang Baik

1	2	3	4	5
diharapkan.(Hi dayat;2000:26)		Memberi buku petunjuk	1.Pengenalan Usaha Kerajinan Indusri. 2.Proses Usaha Kerajinan Indusri. 3.Hambantan hasil Usaha Kerajinan Indusri.	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi di berikan ukuran variable sebagai berikut :

Berperan :Apabila seluruh Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi 66%-100%

Cukup Berperan :Apabila sebagian dari Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi 33%-65%

Kurang Berperan :Apabila tidak satupun Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi 0%-32%

Kategori pengukuran untuk setiap indikator variable penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Memberi pengarahan, dapat dikatakan gorikan:

Berperan :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Berperan :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-56%

Kurang Berperan :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%

2. Memberi bimbingan, dapat dikatakan gorikan:

Berperan :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Berperan :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-56%

Kurang Berperan :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%

3. Melakukan pengawasan, dapat dikatakan gorikan:

Berperan :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Berperan :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-56%

Kurang Berperan :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%

4. Memberikan pendidikan dan pelatihan, dapat dikatakan gorikan:

Berperan :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Berperan :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-56%

Kurang Berperan :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%

5. Memberi buku petunjuk, dapat dikatakan gorikan:

Berperan :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Berperan :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-56%

Kurang Berperan :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan penggabungan metode kuantitatif dengan kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran.

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluru populasi. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kusioner dan wawancara sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kusioner dan wawancara yang dimaksud diatas untuk disebarikan kepada informen dan responden yang sudah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi hal ini terlihat bahwa

pembinaan dan pelatihan yang diberikan belum terlaksana dengan baik dimana Industri Sagu belum mengikuti pembinaan dan pelatihan secara menyeluruh.

C. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2011 : 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adalah jumlah keseluruhan suatu objek yang akan di teliti dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1 : Populasi Dan Sampel Penelitian

NO	Subjek Penelitian	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Seksi Pembinaan IKM Sandang dan Pangan.	1	1	100%
2	Kepemilikan Usaha Industri Pangan.	30	30	45%
	Jumlah	31	31	46%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini digunakan penarikan *sensus* karena jumlah populasi tidak terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 1 sampel yang terdiri dari Kepala Seksi Pembinaan IKM Sandang dan Pangan.

Sedangkan terhadap Kepemilikan Usaha Sagu yang mengikuti pembinaan dengan menggunakan teknik penarikan *sensus* karena jumlah populasi tidak

terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 30 sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpinpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi pelaksanaan pembiaanaan terhadap kepemilikan Usaha Sagu.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data skunder berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian.

2. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan terhadap Kepala UKM Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai Pelaksanaan Pembinaan usaha sagu. Kuisisioner di berikan kepada responden dalam penelitian ini yaitu Kepemilikan Usaha sagu.

4. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, agar gambaran Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP					■																			
3	Revisi UP						■																		
4	Revisi Quisioner							■	■																
5	Rekomendasi Survy									■	■														
6	Survy Lapangan									■	■	■	■												
7	Analisis Data													■	■	■	■								
8	Penyusunan Laporan hasil Penelitian (Skripsi)																	■	■	■	■				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																					■	■	■	■
10	Ujian Konfrehensif Skripsi																							■	■
11	Revisi Skripsi																							■	■
12	Penggandaan Skripsi																							■	■

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Kepulauan Meranti

Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009.

Tuntutan pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari kabupaten Bengkalis. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan terhadap Pembentukan

Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.

B. Gambaran Umum Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti

Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti terlihat pada pasal 3 bahwa Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerjaterdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Perencanaan;

- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. Bidang Pengembangan Potensi Industri terdiri dari:
- c. Seksi Pendataan Potensi dan Pelaporan Industri;
 - d. Seksi Perizinan dan Pengawasan Industri.
5. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan IKM Aneka Industri;
 - b. Seksi Pembinaan IKM Sandang dan Pangan.
4. Bidang Pengembangan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari :
- c. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
 - d. Seksi Informasi, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial;
 - b. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial;
 - c. Seksi Pengawasan Perlindungan dan Perizinan Tenaga Kerja.

Berdasarkan penjelasan diatas pelaksanaan pembinaan industri usaha pangan melalui Seksi Pembinaan dan Pengembangan IKM Sandang dan Pangan dimana pada pada Pasal 15 dikatakan bahwa tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan IKM Sandang dan Pangan sebagai berikut :

- (3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan IKM Sandang dan Pangan mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan,

pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri kecil dan industri menengah sandang dan pangan;

(4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- k. Menghimpun dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- l. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran industri kecil dan industri menengah Sandang dan Pangan.
- m. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah sandang dan pangan;
- n. Merencanakan peningkatan industri Kecil dan makanan khas daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- o. Memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap pelaku usaha industri untuk meningkatkan dan pengembangan industri;
- p. Menyusun rencana dan bahan pembinaan industri sandang dan pangan;
- q. Menyusun strategi perencanaan pemasaran dan promosi produk IKM;
- r. Mempersiapkan dan merencanakan industri agar bisa mengakses bantuan modal baik melalui PEMDA, BANK, BUMN, BUMD maupun Perusahaan swasta;
- s. Menginventarisasi potensi dan permasalahan yang ada dibidang industri kecil dan menengah sebagai dasar untuk pengembangan IKM;
- t. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang pembinaan dan pengembangan Industri kecil menengah.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisioner dan wawancara.

1. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuisioner, wawancara dan kuisioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden. Dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai.

Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 4.1. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Laki-Laki	21	70%
2	Perempuan	9	30%
Jumlah		31	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara laki-laki dengan jumlah 21 responden atau sekitar 70%, hal ini disebabkan laki-laki adalah responden yang paling banyak berperan dalam mengikuti pembinaan. Selanjutnya responden jenis kelamin perempuan sebanyak 9 responden hal ini diketahui perempuan adalah jumlah yang sedikit dalam mengikuti pembinaan. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selanjutnya berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 4.2. Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	≤ 25 tahun	-	-
2	26-39 tahun	10	32%
3	40-49 tahun	20	65%
4	≥ 50 tahun	1	7%
Jumlah		31	3%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara usia 40-49 tahun dengan jumlah 20 orang yang terdiri masyarakat penerima pembinaan. usia 40-49 tahun merupakan usia yang produktif dan aktif dalam melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan. Kemudian usia responden umur 25-39 sebanyak 10 yang terdiri dari masyarakat penerima pembinaan, berusia 50 keatas berjumlah 1 terdiri dari pegawai Dinas dari keseluruhan responden. Kemudian penggolongan responden penelitian berdasarkan pendidikan yang merupakan

factor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 4.3. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	9	29%
3	SMA	19	61%
4	Diploma	2	6%
5	Sarjana	1	3%
6	Pasca Sarjana	-	-
Jumlah		31	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Dari data di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah SMA sebanyak 20 orang, SMP sebanyak 9 orang, Diploma sebanyak 2 orang, Sarjana 1 orang dari keseluruhan jumlah responden.

B. Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi

Pentingnya peranan industri kecil dalam mengembangkan perekonomian nasional ditunjukkan dengan ditetapkannya Peraturan dalam negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian izin Usaha Mikro dan Kecil. Dalam Permendagri ini diatur bahwa pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya, dan pemberian izin usaha sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan

peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Untuk itu dalam meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia, maka pemerintah harus lebih bijak mengenakan program yang direncanakan untuk diberikan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengembangkan ilmu dan sumber daya yang mereka miliki untuk diterapkan dalam kehidupan melalui Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewajiban untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah termasuk dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah industri Sagu dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM IKM baik pengetahuan keterampilan/kreatifitas ataupun Administrasi sehingga mereka mampu dan berdaya saing serta menetapkan keputusan sendiri terkait dengan Usaha Industri yang dilaksanakannya. Pengembangan Industri usahan pangan melalui tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti terlihat pada Pasal 15 dikatakan bahwa tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan IKM Sandang dan Pangan Pelaksanaan pengembangan industri pangan masih terlihat banyak mengalami hambatan dikarenakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah menjadi hambatan mendasar dalam pengembangan usaha kecil tersebut, ditandai

dengan kurangnya kemampuan pengusaha industri pangan menguasai pasar, dan kurangnya pengetahuan para pengusaha tentang bagaimana menjalankan usaha yang baik.

Adapun program kinerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap Industri Pangan di Kecamatan Tebing Tinggi tahun 2019 sebagai berikut:

1. Melakukan Pendataan setiap Industri Usaha Pangan.
2. Penetapan Pembinaan dan Pelatihan bagi setiap Industri Usaha Pangan.
3. Waktu Pembinaan dan Pelatihan selama 5 (lima) Hari.
4. Pemasaran dan Promosi Produk Industri Usaha Pangan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program pemerintah tentang industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, harus memperhatikan keluhan dan masalah yang di sampaikan oleh masyarakat, yaitu minimnya perhatian dari Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti yang mana belum berjalannya perkembangan pengetahuan pengelolaan industri Sagu karena belum optimalnya perhatian dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan pelatihan yang diberikan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk mengetahui pelaksanaan Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi sebagaimana berikut :

1. Indikator Memberi Pengarahan

Memberi pengarahan adalah Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti berperan penting dalam mengarahkan kepemilikan usaha kerajinan industry dalam meningkatkan pengetahuan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat desa. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Memberi pengarahan yaitu :

1. Penyampaian materi.
2. Bentuk pelatihan
3. Pencapaian Industri Sagu.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 4.4. Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberi pengarahan Dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Penyampaian materi.	7 (23%)	18 (60%)	5 (17%)	30
2	Bentuk pelatihan.	7 (23%)	19 (63%)	4 (13%)	30
3	Pencapaian Industri Sagu .	6 (20%)	19 (63%)	5 (16%)	30

1	2	3	4	5
Jumlah	20	56	14	90
Rata-rata	6	19	5	30
Persentase	20%	63%	17%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk indikator Memberi pengarahan dalam item penilaian Penyampaian materi yang mana responden penelitian pada Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi yang menjawab baik sebanyak 7 responden atau 23% dengan alasan, Penyampaian materi melalui pengarahan pengetahuan Pengelolaan sagu . Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 18 responden atau 60% dengan alasan, Penyampaian materi pengetahuan Pengelolaan sagu dengan pengenalan akan Pengelolaan sagu agar dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 5 responden atau 17% dengan alasan, Penyampaian materi pengetahuan Pengelolaan sagu belum terlaksana dengan baik dengan memberikan akan pengetahuan masyarakat akan Pengelolaan sagu dengan cepat dan tepat.

Kemudian untuk item penilaian Bentuk pelatihan yang mana responden penelitian pada Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi yang menyatakan baik berjumlah 7 responden atau 23% dengan alasan, Bentuk pelatihan Pencapaiann hasil Pengelolaan sagu sudah dilakukan dengan tujuan agar kegiatan Pengelolaan sagu dapat diolah dengan baik. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 19 responden atau 63% dengan

alasan, Bentuk pelatihan pencapaiann hasil Pengelolaan sagu sudah dilakukan melalui pengarahan akan tetapi pengarahan yang diberikan belum secara detail sehingga pemilik Industri Sagu belum memahamai secara luas pengarahan yang diberikan. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 4 responden atau 13% dengan alasan, Bentuk pelatihan pencapaiann hasil Pengelolaan sagu belum terlaksana dengan baik melalui pemberian pengarahan sehingga masyarakat pengIndustri Sagu belum memiliki pengetahuan secara luas didalam pengembangan usaha Sagu.

Kemudian untuk item Penilaian Pencapaian Industri Sagu yang mana responden penelitian Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi yang menyatakan baik sebanyak 6 responden atau 20% dengan alasan, Pencapaian Industri Tahu dengan pengarahan didalam Pemasaran Sagu. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 5 responden atau 16% dengan alasan, Pencapaian Industri Sagu dengan pengarahan pemasaran Sagu sudah dilakukan akan tetapi bentuk pemasaran yang diberikan belum secara luas melainkan hanya masukan semata saja melainkan tidak adanya tempat tertentu yang disediakan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 3 responden atau 10% dengan alasan, Pencapaian Industri Sagu melalui pemasaran Industri Sagu belum memberikan pencapaian pengusaha Sagu untuk berkembang melainkan hanya skala lokal saja.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Memberi pengarahan di dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi dalam katagori cukup baik, katagori cukup baik dengan nilai responden 19 atau 63% dengan alasan, pengarahan didalam meningkatkan pengetahuan pemelik Industri Sagu belum memberikan dampak keberhasilan pengetahuan pengIndustri Sagu didalam pengelolaan Industri Sagu dikarenakan hanya sebatas pengarahan saja tanpa pengarahan didalam meningkatkan kemampuan pegelolaan Sagu, serta pemasaran Sagu belum memberikan pengarahan didaam pemasaran sampai kelur daerah pelainkan hanya didalam daerah saja. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Memberi pengarahan dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi melalui Pengarahan pegentahuan Pengelolaan sagu , Pencapaiann hasil Pengelolaan sagu , Pemasaran Sagu.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan IKM Sandang dan Pangan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Bapak Juwardi dalam Pembinaan Industri Sagu pada tanggal 11 Januari 2021.

“...Kegiatan Pembinaan IKM Sandang dan Pangan sejauh ini kami sudah melakukan pengarahan terhadap pemilik usaha Industri Sagu dengan pengarahan kemampuan didalam pengeloaan Sagu, dan bentuk-bentuk pemasaran Sagu hal ini bertujuan agarn Industri Sagu dapat mengembangkan dan memasarkan usahanya tersebut, meskipun sejauh ini pengarahan yang kami berikan belum secara luas akan tetapi pegarahan yang kami berikan mengarah kemampuan pengetahuan Industri Sagu....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pembinaan Usaha Industri Sagu, bahwa kegiatan pembinaan belum memberikan dampak keberhasilan pengetahuan pengIndustri Sagu didalam pengelolaan Industri Sagu hal ini dikarenakan hanya sebatas pengarahan saja tanpa pengarahan didalam meningkatkan kemampuan pegelolaan Sagu, serta pemasaran Prodak Sagu belum memberikan pengarahan didalam pemasaran sampai kelur daerah melainkan hanya didalam daerah saja. Sehingga dapat dikatakan Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi dalam katagori cukup baik.

2. Memberi Bimbingan

Memberi bimbingan adalah Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti mampu berdiskusi terhadap masyarakat desa bentuk-bentuk program yang diberikan yang bertujuan agar masyarakat paham dan mengerti dalam pengembangan usaha kerjainan industri yang diberikan. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Memberi pengarahan yaitu :

1. Bimbingan secara tertulis.
2. Bimbingan secara peraktek..

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam

Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 4.5. Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberi bimbingan Dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Bimbingan secara tertulis.	10 (33%)	14 (46%)	6 (20%)	30
2	Bimbingan secara peraktek.	6 (20%)	16 (53%)	8 (27%)	30
Jumlah		16	30	14	60
Rata-rata		8	15	7	30
Persentase		27%	50%	23%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk indikator Memberi bimbingan dalam item penilaian Bimbingan secara tertulis yang mana responden penelitian pada Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi yang menjawab baik sebanyak 10 responden atau 33% dengan alasan, Bimbingan secara tertulis sudah dilakukan didalam pengemabagan Industri Sagu. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 14 responden atau 46% dengan alasan, Bimbingan secara tertulis didalam pengembangan Industri Sagu melalui pemberian materi tata cara pengembangan Industri Sagu akan tetapi bimbingan yang diberikan masih kurangnya waktu yang diberikan dikarenakan masyarakat Industri Sagu rata-rata memmiliki tingkat kemampuan pendidikan SMA sehingga perlunya kegiatan bimbingan yang memakan waktu lama sampai dengan 1 minggu. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik

sebanyak 6 responden atau 20% dengan alasan, Bimbingan secara tertulis belum terlaksana dengan baik dikarenakan singkatnya waktu bimbingan secara tertulis sehingga belum memberikan dampak terhadap pengetahuan Industri Sagu.

Kemudian untuk item penilaian Bimbingan secara peraktek yang mana responden penelitian pada Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi yang menyatakan baik berjumlah 6 responden atau 20% dengan alasan, Bimbingan secara peraktek sudah dilakukan secara langsung didalam pengembangan Pengelolaan sagu . Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 16 responden atau 53% dengan alasan, Bimbingan secara peraktek sudah dilakukan akan tetapi bimbingan yang diberikan belum memberikan dampak pengetahuan bagi Industri Sagu dikarenakan waktu yang singkat 3 hari seharusnya minimal 5 hari. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 8 responden atau 27% dengan alasan, Bimbingan secara peraktek belum terlaksana dengan baik dikarenakan singkatnya waktu bimbingan secara lisan sehingga belum memberikan dampak pengetahuan terhadap Industri Sagu.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Memberi bimbingan di dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi dalam katagori cukup baik, katagori cukup baik dengan nilai responden 16 atau 53% dengan alasan, bimbingan yang diberikan terhadap Industri Sagu melalui bimbingan secara

tertulis dan Bimbingan secara praktek belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya waktu kegiatan pembinaan sehingga belum memberikan dampak pengetahuan Industri Sagu yang seharusnya dapat dilakukan selama 5 hari melainkan hanya 3 hari. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Memberi bimbingan dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi melalui Bimbingan secara tertulis, Bimbingan secara lisan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Kepala Seksi Pembinaan IKM Sandang dan Pangan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Bapak Juwardi dalam Pembinaan Industri Sagu pada tanggal 11 Januari 2021.

“...Pembinaan IKM Sandang dan Pangan sejauh ini melalui bimbingan yang kami berikan secara lisan dan praktek sudah terlaksana meskipun bimbingan yang kami berikan belum memberikan dampak bagi masyarakat Industri Sagu dikarenakan singkatnya waktu hal ini sesuai dengan program pembinaan yang telah ditetapkan akan tetapi kami selaku Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti mengupayakan pencapaian bimbingan terhadap masyarakat Industri Sagu dengan baik agar mereka mampu didalam pengelolaan kegiatan Sagu....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pembinaan Usaha Industri Sagu dilaksanakan melalui bimbingan secara tertulis, lisan dan praktek lapangan akan tetapi belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan kurangnya waktu kegiatan pembinaan yang ditetapkan selama 5 hari namun terlaksana selama 3 hari sehingga belum memberikan dampak pengetahuan Industri Sagu yang seharusnya dapat dilakukan selama 5 hari melainkan hanya

3 hari. Sehingga dapat dikatakan Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi dalam katagori cukup baik.

3. Melakukan Pengawasan

Melakukan pengawasan adalah Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti mengawasi kegiatan pelaksanaan usaha kerajinan industry oleh kepemilikan usaha secara langsung guna agar tidak terjadinya kesalahan dan kendala dalam mengembangkan usaha industry tersebut. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Memberi pengarahan yaitu :

1. Pengawasan kegiatan Industri pangan.
2. Pengawasan hasil kegiatan Pengelolaan sagu .

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 4.6. Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberi pengawasan Dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pengawasan kegiatan Industri pangan.	11 (36%)	14 (47%)	5 (17%)	30
2	Pengawasan hasil Industri pangan.	9 (30%)	11 (36%)	10 (33%)	30
Jumlah		20	25	15	60
Rata-rata		10	12	8	30
Persentase		33%	40%	27%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk indikator Memberi pengawasan dalam item penilaian Pengawasan kegiatan Industri pangan yang mana responden penelitian pada Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi yang menjawab baik sebanyak 11 responden atau 36% dengan alasan, Pengawasan kegiatan Industri Sagu sudah dilakukan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 14 responden atau 47% dengan alasan, Pengawasan kegiatan Industri Sagu sudah dilakukan akan tetapi pengasan yang dilakukan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti belum secara rutin memberikan masukan akan adanya masalah didalam Pengelolaan sagu . Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 5 responden atau 17% dengan alasan, Pengawasan kegiatan Industri Sagu belum terlaksana dengan baik dikarenakan pengawasan yang dilakukan belum memberikan upaya melalukan perbaikan Pengelolaan sagu oleh Industri

melainkan berlangsung begitu saja dikarenakan kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan pengawasan.

Kemudian untuk item Pengawasan hasil Industri pangan yang mana responden penelitian pada Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi yang menyatakan baik berjumlah 9 responden atau 30% dengan alasan, Pengawasan hasil kegiatan Pengelolaan sagu sudah dilakukan guna mengenali akan hasil kegiaitan Pengelolaan sagu . Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 11 responden atau 36% dengan alasan, Pengawasan hasil kegiatan Pengelolaan sagu sudah dialkukan akan tetapi belum adanya evaluasi terkait hasil kegiatan agar lebih meningkatkan pegenlolaan Sagu.. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 10 responden atau 33% dengan alasan, Pengawasan hasil kegiatan Pengelolaan sagu belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya jumlah pegawai serta belum memberikan peningkatan Pengelolaan sagu bagi Industri.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Memberi pengawasan di dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi dalam katagori cukup baik, katagori cukup baik dengan nilai responden 12 atau 40% dengan alasan, kegiatan pembinaan Sagu melalui pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan

pengawasan sehingga kegiatan pengawasan berlangsung begitu saja tanpa ada evaluasi terkait adanya kendala dan permasalahan didalam Pengelolaan sagu oleh masyarakat. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Memberi bimbingan dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi melalui Pengawasan Keberlangsungan kegiatan Pengelolaan sagu, Pengawasan hasil kegiatan Pengelolaan sagu Bimbingan secara tertulis, Bimbingan secara lisan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan IKM Sandang dan Pangan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Bapak Juwardi dalam Pembinaan Industri Sagu pada tanggal 11 Januari 2021.

“...Pembinaan IKM Sandang dan Pangan melalui pengawasan yang kami berikan didalam hasil kegiatan Pengelolaan sagu sudah terlaksana meskipun masih terbilang adanya kendala dikarenakan kurangnya jumlah pegawai didalam pengawasannya akan tetapi kami selalu berusaha didalam pencapaian hasil kegiatan Industri Sagu....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pembinaan Usaha Industri Sagu, melalui pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan berlangsung begitu saja tanpa ada evaluasi terkait adanya kendala dan permasalahan didalam Pengelolaan sagu oleh masyarakat. Sehingga dapat dikatakan Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi dalam katagori cukup baik.

4. Memberikan Pendidikan Dan Pelatihan

Memberikan pendidikan dan pelatihan adalah Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan usaha kerajinan industri agar kepemilikan usaha kerajinan industri paham serta mengetahui bagaimana pengembangan usaha hasil kerajinan industri tersebut. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Memberi pengarahan yaitu :

1. Kegiatan Pelatihan secara tertulis.
2. Kegiatan Pelatihan dalam bentuk peraktek.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 4.7. Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberikan pendidikan dan pelatihan Dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kegiatan Pelatihan secara tertulis.	11 (37%)	17 (57%)	2 (7%)	30
2	Kegiatan Pelatihan dalam bentuk peraktek.	8 (27%)	14 (47%)	8 (27%)	30
Jumlah		19	31	10	60
Rata-rata		10	16	5	30
Persentase		33%	53%	14%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk indikator Memberikan pendidikan dan pelatihan dalam item penilaian Kegiatan Pelatihan secara tertulis yang mana responden penelitian pada Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi yang menjawab baik sebanyak 11 responden atau 37% dengan alasan, kegiatan pelatihan secara tertulis sudah dilakukan didalam pengembangan Industri Sagu. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 17 responden atau 57% dengan alasan, kegiatan pelatihan secara tertulis didalam pengembangan Industri Sagu melalui pemberian materi tata cara pengembangan Industri Sagu akan tetapi bimbingan yang diberikan masih kurangnya waktu yang diberikan dikarenakan masyarakat Industri Sagu rata-rata memiliki tingkat kemampuan pendidikan SMA sehingga perlunya kegiatan bimbingan yang memakan waktu lama sampai dengan 1 minggu. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 2 responden atau 7% dengan alasan, kegiatan pelatihan secara tertulis belum terlaksana dengan baik dikarenakan singkatnya waktu bimbingan secara tertulis sehingga belum memberikan dampak terhadap pengetahuan Industri Sagu.

Kemudian untuk item penilaian Kegiatan Pelatihan dalam bentuk peraktek yang mana responden penelitian pada Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi yang menyatakan baik berjumlah 8 responden atau 27% dengan alasan, Kegiatan Pelatihan dalam bentuk peraktek sudah dilakukan

secara langsung didalam pengembangan Pengelolaan sagu . Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 14 responden atau 47% dengan alasan, Kegiatan Pelatihan dalam bentuk peraktek sudah dilakukan akan tetapi bimbingan yang diberikan belum memberikan dampak pengetahuan bagi Industri Sagu dikarenakan waktu yang singkat 3 hari seharusnya minimal 5 hari. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 8 responden atau 27% dengan alasan, Kegiatan Pelatihan dalam bentuk peraktek belum terlaksana dengan baik dikarenakan singkatnya waktu bimbingan secara lisan sehingga belum memberikan dampak pengetahuan terhadap Industri Sagu.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Memberi bimbingan di dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi dalam katagori cukup baik, katagori cukup baik dengan nilai responden 16 atau 53% dengan alasan, Kegiatan pembinaan Industri Sagu melalui kegiatan secara tertulis dan kegiatan pelatihan praktek belum memberikan dampak pengetahuan bagi Industri Sagu dikarenakan kemampuan pelatihan masih terlihat sesuai dengan kemampuan para Industri Sagu yang seharusnya pelatihan memiliki kemampuan yang lebih dari yang menerima pelatih dan didasarkan kemampuan pendidikan sesuai dengan bidangnya sehingga kegiatan pelatihan memberikan potensi terhadap yang menerima pelatihan tersebut. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Kegiatan Pelatihan secara tertulis, Kegiatan Pelatihan dalam bentuk peraktek.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan IKM Sandang dan Pangan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Bapak Juwardi dalam Pembinaan Industri Sagu pada tanggal 11 Januari 2021.

“...Pembinaan IKM Sandang dan Pangan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang kita lakukan sudah sesuai dengan pengembangan kemampuan Industri Sagu, meskipun kegiatan yang kami lakukan masih mengalami kendala didalam pelatihannya dikarenakan kurangnya waktu kegiatan pelatihan yang telah ditetapkan, akan tetapi kami selalu berusaha memberikan pelatihan yang terbaik bagi Industri Sagu....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pembinaan Usaha Industri Sagu melalui pembinaan secara tertulis dan praktek lapangan dimana diketahui belum memberikan dampak pengetahuan bagi Industri Sagu dikarenakan kemampuan pelatihan masih rendah yang seharusnya pelatihan memiliki kemampuan yang lebih dari yang menerima pelatih dan didasarkan kemampuan pendidikan sesuai dengan bidangnya sehingga kegiatan pelatihan memberikan potensi terhadap yang menerima pelatihan tersebut. Sehingga dapat dikatakan Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi dalam katagori cukup baik.

5. Memberi Buku Petunjuk

Memberi buku petunjuk adalah Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan buku petunjuk dalam pengembangan hasil kerajinan industri yang diberikan agar masyarakat lebih paham bagaimana penanganannya lebih cepat dan maksimal serta dapat bersaing ditegah pasar ekonomi masyarakat. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Peranan

Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Memberi pengarahan yaitu :

1. Pengenalan Usaha Kerajinan Industri
2. Penanganan Hambatan Usaha industry pangan.
3. Bentuk-bentuk Pengembangan industry pangan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 4.8. Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberi Memberi buku petunjuk Dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pengenalan Usaha Kerajinan Indusri.	8 (27%)	17 (57%)	5 (17%)	30
2	Penanganan Hambatan Usaha industry pangan.	10 (33%)	10 (33%)	10 (33%)	30
3	Bentuk-bentuk Pengembangan industry pangan.	10 (33%)	12 (40%)	8 (27%)	30
Jumlah		28	39	23	90
Rata-rata		9	13	8	30
Persentase		30%	43%	27%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk indikator Memberi buku petunjuk dalam item penilaian Pengembangan Industri Sagu yang mana

responden penelitian pada Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi yang menjawab baik sebanyak 8 responden atau 27% dengan alasan, Pengembangan Industri Sagu memalui buku petunjuk yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 17 responden atau 57% dengan alasan, Pengembangan Industri Sagu memalui buku petunjuk didalam pengembangan kemampuan Industri Sagu. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 5 responden atau 17% dengan alasan, Pengembangan Industri Sagu melalui buku petunjuk sudah diberikan akan tetapi didalam buku petunjuk Industri masih bingunga dan pelunya secara langsung dilakukan penjelasan.

Kemudian untuk item penilaian Penaganan Hambantan Usaha industry pangan yang mana responden penelitian pada Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi yang menyatakan baik berjumlah 10 responden atau 33% dengan alasan, Penaganan Hambantan Usaha industri pangan Industri Sagu melalui buku petunjuk sudah diberikan terhadap para Industri. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 10 responden atau 33% dengan alasan, Penaganan Hambantan Usaha industry pangan Industri Sagu sudah diberikan terhadap Industri Sagu akan tetapi didalam buku petunjuk Industri belum memahami kegiatan yang dirahakan serata belum semua Industri menerima buku petunjuk yang dibagikan. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 10 responden atau 33% dengan alasan,

Penanganan Hambatan Usaha industry pangan Industri Sagu melalui buku petunjuk belum terlaksan dengan baik dimana masih banyak Industri belum menerima buku petunjuk didalam menagani hambatan didalam Pengelolaan sagu .

Kemudian untuk item Penilaian Pemasaran Sagu yang mana responden penelitian Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi yang menyatakan baik sebanyak 10 responden atau 33% dengan alasan, Pemasaran Industri Sagu melalui pemberian buku petunjuk sudah diberikan bagi Industri Sagu. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 12 responden atau 40% dengan alasan, Pemasaran Industri Sagu melalui buku petunjuk sudah dilakukan akan tetapi belum semua Industri pandai mnerima buku petunjuk dan terlihat industri belum memahami secara luas penjelasan yang ada didalam buku petunjuk. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 8 responden atau 27% dengan alasan, Pemasaran Industri Sagu melalui buku petunjuk yang diberikan bagi Industri Sagu belum terlaksana dengan baik dimana diketahui masih banyak Industri belum menerima buku panduan didalam pemasaran hasil pengelola Sagu.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Memberi buku petunjuk di dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi dalam katagori cukup baik, katagori cukup baik dengan nilai responden 13 atau 47% dengan alasan, pengembangan Sagu, pemasaran dan penanggulangan hambatan Pengelolaan sagu

memalui buku petunjuk belum terlaksana dengan baik dimana Industri belum memahami penjaelasan dari buku petunjuk yang diberikan dan Industri belum secara merata menerima buku petunjuk yang diberikan sehingga tidak semua Industri memahami secara luas arahan didalam buku petunjuk yang telah disediakan. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Memberi pengarahan dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi melalui Pengembangan Industri Sagu, Penanganan hambatan Industri Sagu, Pemasaran Industri Sagu.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan IKM Sandang dan Pangan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Bapak Juwardi dalam Pembinaan Industri Sagu pada tanggal 11 Januari 2021.

“...Sejauh ini kami didalam pengembangan pendai Sagu sudah memberikan buku petunjuk terhadap Industri Sagu agar mereka lebh memahami bentuk pengembangan Sagu, pemasaran dan penanggulangan hambatan Pengelolaan sagu , meskipun masih terlihat Industri memahami bentuk penjelasan didalam buku petunjuk akan tetapi kami selalu memberikan pengarahan apabila dipertanyakan....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pembinaan Usaha Industri Sagu, bahwa pelaksanaan pemasaran dan penanggulangan hambatan Pengelolaan sagu melalui buku petunjuk belum memberikan dampak terhadap kemampuan para pemilik usaha industry Sagu dikarenakan penjaelasan dari buku petunjuk sangat luas dan membigungkan sehingga tidak semua Industri memahami secara luas arahan didalam buku petunjuk yang telah disediakan. Sehingga dapat dikatakan Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi dalam katagori cukup baik.

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.9. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memberi pengarahan	6 (20%)	19 (63%)	5 (17%)	30
2	Memberi bimbingan	8 (27%)	15 (50%)	7 (23%)	30
3	Melakukan pengawasan	10 (33%)	12 (40%)	8 (27%)	30
4	Memberikan pendidikan dan pelatihan	10 (33%)	16 (53%)	4 (14%)	30
5	Memberi buku petunjuk	9 (30%)	13 (43%)	8 (27%)	30
Jumlah		43	75	32	150
Rata-rata		9	15	6	30
Persentase		30%	50%	20%	100%

Sumber : Oalahan Data Penelitian, 2020

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa responden Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi Dalam Memberi pengarahan yang menjawab baik 6 atau 20%, Selanjutnya untuk jawaban cukup

baik 19 atau 63%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 5 atau 17%.

Untuk indikator kedua yaitu Memberi bimbingan dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi Dalam Memberi bimbingan yang menjawab baik 8 responden atau 27%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 15 responden atau 50%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 7 responden atau 23%.

Untuk indikator ketiga Melakukan pengawasan dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi Dalam Melakukan pengawasan yang menjawab baik 10 responden atau 33%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 12 responden atau 40%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 8 responden atau 27%.

Untuk indikator keempat Memberikan pendidikan dan pelatihan dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi Dalam Memberikan pendidikan dan pelatihan yang menjawab baik 10 responden atau 33%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 16 responden atau 53%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 responden atau 14%.

Untuk indikator kelima Memberi buku petunjuk dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi Memberi buku petunjuk

yang menjawab baik 10 responden atau 33%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 12 responden atau 40%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 8 responden atau 27%.

Secara keseluruhan dari tabel di atas terlihat bahwa untuk responden yang menjawab terlaksana dengan rata-rata 9 orang atau persentase 30%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana dengan rata-rata 13 orang atau persentase 43%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana 8 orang atau 27%, sehingga dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa kegiatan pembinaan Industri Sagu melalui pemberian pengarahan didalam pengembangan usaha Sagu belum memberikan dampak keberhasilannya hal ini dikarenakan kegiatan pengarahan tidak mengarah akan bentuk-bentuk dan upaya pegolah pengembangan usaha Sagu secara umum melainkan hanya pengenalan usahan Sagu sehingga peparahan yang diberikan belum memberikan pengaruh akan peningkatan kemampuan pemilik Industri Sagu.

Kegiatan pembinaan Industri Sagu melalui pemberian pengarahan didalam pengembangan usaha Sagu belum memberikan dampak keberhasilannya hal ini dikarenakan kegiatan pengarahan tidak mengarah akan bentuk-bentuk dan upaya pegolah pengembangan usaha Sagu secara umum melainkan hanya pengenalan usahan Sagu sehingga peparahan yang diberikan belum memberikan pengaruh akan peningkatan kemampuan pemilik Industri Sagu. Pemberian bimbingan secara tertulis terkait upaya dan bentuk pengelolaan Industri Sagu belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan kurangnya penetapan waktu kegiatan bimbingan dimana ditetapkan selama 5 hari realisasinya hanya 3 hari

sehingga belum memaksimalkan kegiatan pembinaan yang diberikan mulai dari pembinaan materi pembelajaran akan pengenalan alat dan Pengelolaan sagu, kegiatan praktek, hingga bentuk pemasarannya. Kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti diketahui kurangnya jumlah pegawai dimana diketahui jumlah pegawai didalam melakukan pengawasan sebanyak 4 orang sehingga terlihat kegiatan pengawasan tidak memadai dengan jumlah usaha Sagu yang mengikuti pembinaan sehingga kegiatan terlihat berlangsung begitu saja tanpa ada evaluasi terkait upaya menanggulangi kendala dan permasalahan didalam Pengelolaan sagu tersebut. Kegiatan pemberian pendidikan dan pelatihan belum memberikan pengetahuan bagi penerima pembinaan dikarenakan kemampuan pelatihan tidak didasarkan kemampuan didalam pengetahuan akan Pengelolaan sagu dan upaya bentuk praktek pahami pengelolaannya mulai dari pengenalan penggunaan alat-alat dan sampai dengan bahan-bahan Sagu, sehingga terlihat masih tergolong sama dengan kemampuan penerima pelatihan usaha Sagu. Dan Pembinaan melalui pemberian buku petunjuk belum memberikan upaya pengembangan pengetahuan pengelolaan dan pengembangan akan kepemilikan usaha Sagu hal ini dikarenakan penjelasannya yang terlalu panjang dan tidak mengarah secara langsung terhadap bentuk dan upaya pengelolaan pengembangan Usaha Sagu.

C. Hambatan Peran Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi, meliputi :

1. Memberi pengarahan

Kegiatan pembinaan Industri Sagu melalui pemberian pengarahan didalam pengembangan usaha Sagu belum memberikan dampak keberhasilannya hal ini dikarenakan kegiatan pengarahan tidak mengarah akan bentuk-bentuk dan upaya pegolah pengembangan usaha Sagu secara umum melainkan hanya pengenalan usahan Sagu sehingga pegasarahan yang diberikan belum memberikan pengaruh akan peningkatan kemampuan pemilik Industri Sagu.

Begitu juga dari hasil wawancara, kuesioner dan observasi bahwa pegasarahan yang diberikan hanya sebatas pengerahan akan pengenalan Industri Sagu melainkan tidak dalam bentuk-bentuk dan akan upaya pegolah pengembangan usaha Sagu secara umum.

2. Memberi bimbingan

Pemberian bimbingan oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti melalui bimbingan secara tertulis terkait upaya dan bentuk pengelolaan Industri Sagu dan bimbingan secara lisan didalam penyampaianya diketahui belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan kurangnya penetapan waktu kegiatan bimbingan dimana ditetapkan selama 5 hari

realisasinya hanya 3 hari yang seharusnya ditingkatkan selama 5 hari, sehingga belum memaksimalkan kegiatan pembinaan yang diberikan mulai dari pembinaan materi pembelajaran akan pengenalan alat dan Pengelolaan sagu, kegiatan praktek, hingga bentuk pemasarannya.

Begitu juga dari hasil wawancara, kuesioner dan observasi bahwa kegiatan bimbingan belum dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan waktu kegiatan bimbingan selama 5 hari melainkan realisasinya hanya 3 hari, sehingga belum memberikan pengajaran pemberian dalam bentuk materi pembelajaran pengenalan alat-alat Pengelolaan sagu dan kegiatan praktek, hingga bentuk pemasarannya.

3. Melakukan pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti diketahui kurangnya jumlah pegawai dimana diketahui jumlah pegawai didalam melakukan pengawasan sebanyak 4 orang yang seharusnya 6 orang sehingga terlihat kegiatan pengawasan berlangsung begitu saja tanpa ada evaluasi terkait upaya menanggulangi kendala dan permasalahan didalam Pengelolaan sagu tersebut.

Begitu juga dari hasil wawancara, kuesioner dan observasi bahwa pengawasan keberhasilan praktek usaha Sagu belum berlangsung dengan baik hal ini dikarenakan jumlah pegawai didalam melakukan pengawasan sebanyak 4 orang yang seharusnya 6 orang sehingga kegiatan pengawasan tidak terlaksana dengan maksimal.

4. Memberikan pendidikan dan pelatihan

Kegiatan pemberian pendidikan dan pelatihan belum memberikan pengetahuan bagi penerima pembinaan dikarenakan kemampuan pelatihan tidak didasarkan kemampuan didalam pengetahuan akan Pengelolaan sagud an upaya bentuk praktek pahami pengelolaannya mulai dari pengenalan penggunaan alat-alat dan sampai dengan bahan-bahan Sagu, sehingga terlihat masih tergolong sama dengan kemampuan penerima pelatihan usaha Sagu.

Begitu juga dari hasil wawancara, kuesioner dan observasi bahwa pemberian pendidikan dan pelatihan terhadap Industri Sagu bahwa kemampuan petugas pelatihan tidak didasarkan kemampuan didalam pengetahuan akan pengelolaan Sagu yang seharusnya memiliki kemampuan yang didasarkan kemampuan pendidikan sehingga kegiatan dapat menunjang kemampuan pengusaha isdutri Sagu tersebut.

5. Memberi buku petunjuk

Pembinaan usaha Industri Sagu dengan memberikan buku petunjuk belum memberikan upaya pengembangan pengetahuan pengelolaan dan pengembangan akan kepemilikan usaha Sagu hsl ini dikarenakan penjelasannya yang terlalu panjang dan tidak mengarah secara langsung terhadap bentuk dan upaya pengelolaan pengembangan Usaha Sagu.

Begitu juga dari hasil wawancara, kuesioner dan observasi bahwa memberikan buku petunjuk didalam pengembangan pengetahuan pengelolaan dan pengembangan pengelolaan Sagu, belum memberikan pengarahan secara langsung terhadap bentuk dan upaya pengelolaan pengembangan Usaha Sagu,

sehingga kepemilikan usaha masih bingung didalam pemahaman akan buku petunjuk yang diberikan.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pembinaan Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi berdasarkan hasil analisa dari indikator Memberi pengarahan, Memberi bimbingan, Melakukan pengawasan, Memberikan pendidikan dan pelatihan, Memberi buku petunjuk hasil penelitian dikatakan cukup baik hal ini diketahui Kegiatan pembinaan Industri Sagu melalui pemberian pengarahan didalam pengembangan usaha Sagu sudah terlaksana akan tetapi belum memberikan dampak keberhasilannya hal ini dikarenakan kegiatan pengarahan tidak mengarah akan bentuk-bentuk dan upaya pegolah pengembangan usaha Sagu secara umum melainkan hanya pengenalan usahan Tahu. Pemberian bimbingan secara tertulis terkait upaya dan bentuk pengelolaan Industri Sagu belum terlaksana selama 5 hari realisasinya hanya 3 hari begitu juga diketahui jumlah pegawai didalam melakukan pengawasan sebanyak 4 orang sehingga terlihat kegiatan pengawasan tidak memadai dengan jumlah usaha Sagu yang mengikuti pembinaan. Kegiatan pemberian pendidikan dan pelatihan belum memberikan pengetahuan bagi penerima pembinaan dikarenakan kemampuan pelatihan tidak didasarkan kemampuan didalam pengetahuan akan Pengelolaan sagu, pengenalan penggunaan alat-alat dan sampai dengan bahan-bahan Sagu,

sehingga terlihat masih tergolong sama dengan kemampuan penerima pelatihan usaha Sagu.

2. Hambatan pelaksanaan Pembinaan Industri Pangan di Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa diketahui kurangnya penetapan waktu kegiatan bimbingan sehingga belum memberikan pengembangan dan pengenalan akan diman diketahui kegiatan bimbingan mulai dari awal sampai selesai selama 3 hari yang seharusnya maksimal sampai dengan 5 hari, Diketahui kurangnya jumlah pegawai dimana jumlah pegawai hanya 4 orang yang seharusnya 6 orang sehingga terlihat kegiatan pengawasan berlangsung begitu saja tanpa ada evaluasi terkait upaya menanggulangi kendala dan permasalahan didalam Pengelolaan sagu tersebut, kemampuan pelatihan masih biasa dan tergolong sama dengan kemampuan para Industri Sagu yang ada, yang seharusnya pemberi pelatihan memiliki kemampuan yang didasarkan kemampuan pendidikan sehingga kegiatan dapat menunjang kemampuan pengusaha isdutri Sagu tersebut, serta buku petunjuk yang disediakan bagi pengusaha industry Sagu belum memberikan penjelasan pengembangan usaha industry tahu tempa secara detail dan panjang didalam penjelasannya sehingga tidak semua Industri memahami secara luas arahan didalam buku pentunjuk yang telah disediakan.

B. Saran

1. Sebaiknya Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan kerjasama dengan para ahli didalam Pengelolaan sagu sehingga kegiatan pembinaan berlangsung tepat sasaran.

2. Perlunya Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti meningkatkan waktu kegiatan pembinaan Industri Sagu dari 5 hari menjadi 5 hari kegiatan pembinaan dan pelatihan.
3. Sebaiknya Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti menambah jumlah pegawai didalam melakukan pembinaan sebanyak 6 orang yang sebelumnya 4 orang.
4. Sebaiknya Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan petugas pemberi pembinaan dan pelatihan berdasarkan kemampuan tingkat pendidikan sarjana dan pengalaman pengembangan usaha industri pangan.
5. Sebaiknya Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti mempersingkat penjelasan bentuk-bentuk pengembangan pengelolaan usaha industri pangan Tahu, agar masyarakat memahami secara langsung akan upaya tindakan yang dilakukan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Basri, Hasan. 2010. *Konsep Pembinaan dalam Organisasi*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Hermansyah. 2011. *Sosiologi: Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta:PT. Bumi Aksara.
- Juditira, 2004. Pengantar *Teori Peran*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Lailia Fatkul Janah, 2009. *Teori Peran*, Gunung Mas, Jakarta.
- Mahfud MD. 2001. *Dasar dan Struktur KetataNegaraan Indonesia*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecapatan(PATEN)*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Mustafa Hasan, 2000. *Perspektif Dalam Psikologi Sosial*, Sarana Ilmu, Yogyakarta.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
- Munawir, Arif. 2010. *Organisasi Pembinaan*, Jakarta, Rajawali.
- Munandar, 2010. *Pembinaan dalam Organisasi*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Nawawi, Zaidan, 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rasyid. M, Ryas. 2005. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Yasif Wtampone.
- Reshandy, Raden. 2010. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta, Rajawali.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Santoso, 2004. *Pengembangan Organisasi*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Setyawan S, Dharma, 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

_____, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Raja Grando Persada.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

_____. 2013. *Sistem Pemerintahan Indonesia I*. Bandung: Mandar Maju.

Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta, Rajawali.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang No 5 tahun 1984 tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.